



KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR: PER. // /KA/IV/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR: PER.20/KA/VII/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemrosesan dokumen penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu dibentuk Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya;
  - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana termaktub pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.20/KA/VIII/2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 133 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5388);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 194/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.04/KA/II/2015;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1314/M.PAN-RB/04/2015 tanggal 13 April 2015;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR: PER.20/KA/VII/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.20/KA/VII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 23 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 23 A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, LP3TKI Surabaya lebih menitik beratkan pada tugas dan fungsi di bidang Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), verifikasi dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dan Pelayanan SISKOTKLN dan penerbitan e-KTKLN.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LP3TKI Surabaya difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menangani fungsi pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (3) Tugas dan fungsi LP3TKI selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerja sama antara LP3TKI Surabaya dan UPTD yang menangani fungsi pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur secara bersama-sama oleh Kepala BNP2TKI dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER.03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

3. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

#### Pasal II

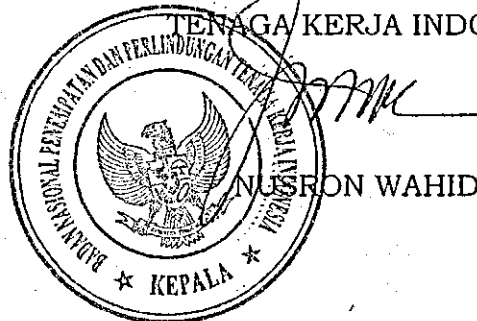
Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2015

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA



Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR II TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR: PER.20/KA/VII/2014 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NAMA, LOKASI, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

NO.	NAMA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI/P2TKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
A.	Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)			
1.	BP3TKI Banda Aceh	Banda Aceh	BNP2TKI	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2.	BP3TKI Medan	Medan	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Utara
3.	BP3TKI Tanjung Pinang	Tj. Pinang	BNP2TKI	Provinsi Kepulauan Riau
4.	BP3TKI Pekanbaru	Pekanbaru	BNP2TKI	Provinsi Riau, Provinsi Jambi
5.	BP3TKI Padang	Padang	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Barat
6.	BP3TKI Palembang	Palembang	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Selatan Bengkulu, Bangka Belitung
7.	BP3TKI Lampung	Lampung	BNP2TKI	Provinsi Bandar Lampung
8.	BP3TKI DKI Jakarta	Jakarta	BNP2TKI	Provinsi DKI Jakarta
9.	BP3TKI Serang	Serang	BNP2TKI	Provinsi Banten
10.	BP3TKI Bandung	Bandung	BNP2TKI	Provinsi Jawa Barat
11.	BP3TKI Yogyakarta	Yogyakarta	BNP2TKI	Provinsi D.I. Yogyakarta
12.	BP3TKI Semarang	Semarang	BNP2TKI	Provinsi Jawa Tengah
13.	BP3TKI Denpasar	Denpasar	BNP2TKI	Provinsi Bali
14.	BP3TKI Kupang	Kupang	BNP2TKI	Provinsi Nusa Tenggara Timur
15.	BP3TKI Mataram	Mataram	BNP2TKI	Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	NAMA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI/P2KTKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
16.	BP3TKI Banjarbaru	Banjarbaru	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Selatan
17.	BP3TKI Pontianak	Pontianak	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Barat
18.	BP3TKI Nunukan	Nunukan	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, meliputi: Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung, Kab.Tanjung Selor, Kab.Melinau
19.	BP3TKI Manado	Manado	BNP2TKI	Provinsi Sumawesi Utara
20.	BP3TKI Makassar	Makassar	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Dan Irian Jaya Barat.
B.	Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI)			
1.	LP3TKI Palu	Palu	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Tengah
2.	LP3TKI Kendari	Kendari	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Tenggara
3.	LP3TKI Gorontalo	Gorontalo	BNP2TKI	Provinsi Gorontalo
4.	LP3TKI Surabaya	Surabaya	BNP2TKI	Provinsi Jawa Timur
C.	Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI)			
1.	P4TKI Aceh Tamiang	Kabupaten Aceh Tamiang	BP3TKI Banda Aceh	Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Utara
2.	P4TKI Asahan	Kabupaten Asahan	BP3TKI Medan	Kota Tanjung Balai Asahan, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab.Simalungun, Kab. Labuhan Batu, Kab.Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan
3.	P4TKI Tanjung Balai Karimun	Kabupaten Tanjung Balai Karimun	BP3TKI Tanjung Pinang	Kabupaten Tanjung Balai Karimun
4.	P4TKI Batam	Kota Batam	BP3TKI Tanjung Pinang	Kota Batam
5.	P4TKI Dumai	Kota Dumai	BP3TKI Pekanbaru	Kota Dumai

NO.	NAMA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI/P2KTKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
6.	P4TKI Jambi	Jambi	BP3TKI Pekanbaru	Provinsi Jambi
7.	P4TKI Bekasi	Kota/Kab. Bekasi	BP3TKI Bandung	Kota/Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta
8.	P4TKI Cirebon	Kabupaten Cirebon	BP3TKI Bandung	Kabupaten/Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Maja- lengka, Kab. Kuningan
9.	P4TKI Cilacap	Kabupaten Cilacap	BP3TKI Semarang	Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara, Kab. Kebu- men, Kab. Banyumas
10.	P4TKI Pemalang	Kabupaten Pemalang	BP3TKI Semarang	Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes
11.	P4TKI Tangerang	Kota/Kab. Tangerang	BP3TKI Serang	Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kab. Tangerang
12.	P4TKI Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	BP3TKI Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Tengah
13.	P4TKI Sambas	Kabupaten Sambas	BP3TKI Pontianak	Kabupaten Sambas
14.	P4TKI Entikong	Kabupaten Entikong	BP3TKI Pontianak	Kabupaten Entikong
15.	P4TKI Parepare	Kota Parepare	BP3TKI Makassar	Kota Pare-pare
16.	P4TKI Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	BP3TKI Makassar	Provinsi Sulawesi Barat
17.	P4TKI Maumere	Kabupaten Maumere	BP3TKI Kupang	Kabupaten Maumere
18.	P4TKI Sumba	Kabupaten Sumba	BP3TKI Kupang	Kabupaten Sumba

NO.	NAMA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI/P2KTKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
19.	P4TKI Labuhan Bajo	Kabupaten Manggarai	BP3TKI Kupang	Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Bajawa
20.	P4TKI Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	BP3TKI Bandung	Kabupaten/Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota Bogor
21.	P4TKI Madiun	Kabupaten Madiun	LP3TKI Surabaya	Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung
22.	P4TKI Malang	Kabupaten Malang	LP3TKI Surabaya	Kabupaten/Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Probolinggo
23.	P4TKI Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	LP3TKI Surabaya	Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban.
24.	P4TKI Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	LP3TKI Surabaya	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember.
D.	Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (P2KTKI)			
1.	P2KTKI Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta	Bandar Udara Soekarno Hatta	BP3TKI Serang	Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID